



# PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan produksi usaha daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DAN  
BUPATI REJANG LEBONG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong.

10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
15. Budidaya adalah teknis yang dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi usaha pembibitan, pembenihan dan pembesaran yang menghasilkan bibit dan benih berkualitas tinggi.
16. Tanaman pangan adalah segala hal yang berkaitan dengan serealia, aneka kacang-kacangan dan umbi-umbian yang berfungsi sebagai bahan penghasil karbohidrat.
17. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
18. Bibit tanaman adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif atau yang telah mengalami proses penyemaian menjadi tanaman muda dan siap untuk disalurkan (Transplanting).
19. Benih adalah bahan tanaman serta benih biota perairan dan benih biota darat dan benih ternak (sperma, embrio) dalam bentuk biji, ekor atau satuan lainnya.
20. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar.
21. Benih pokok adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok.
22. Benih sebar adalah keturunan dari benih pokok, benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar.
23. Benih berlabel adalah keturunan pertama dari benih sebar/benih-benih unggul lokal daerah yang telah dimurnikan dan/atau dideterminasi oleh BPSB serta telah terdaftar pada Badan Perlindungan Varietas.
24. Seedling adalah benih calon batang bawah.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan atau bibit benih ikan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
36. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi daerah oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dinyatakan lulus uji jaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dan diberikan label jaminan mutu.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, kelas dan satuan produksi usaha daerah.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI**

### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu setiap pembelian atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan hasil Produksi Usaha Daerah.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII KEBERATAN**

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang adanya alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### Pasal 24

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI**

### Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan masing-masing Perangkat Daerah sebagai pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dengan jenis dan objek Retribusi yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XX PEMANFAATAN**

### Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## **BAB XXI KETENTUAN KHUSUS**

### Pasal 27

Setiap pejabat dan/atau Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 28 Oktober 2011

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 31 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**SUDIRMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2011 NOMOR 69 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 31 TAHUN 2011  
TANGGAL 31 OKTOBER 2011

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**A. Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong**

No	Komoditi	Harga Masing-Masing Kelas Benih					Keterangan
		Benih Dasar/ Label Putih (Rp)	Benih Pokok/ Label Ungu (Rp)	Benih Sebar/ Label Biru (Rp)	Benih Berlabel/ Label MJ (Rp)	Seedling/ Label MJ (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Tanaman Pangan :</b>						
	- Padi	20.000,-	10.000,-	7.500,-	5.000,-	-	Per Kg
	- Gandum	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	-	Per Kg
	- Jagung	25.000,-	10.000,-	7.000,-	6.000,-	-	Per Kg
	- Kacang Hijau	25.000,-	15.000,-	10.000,-	8.000,-	-	Per Kg
	- Kacang Tanah	35.000,-	25.000,-	15.000,-	7.000,-	-	Per Kg
	- Kedelai	25.000,-	15.000,-	10.000,-	8.000,-	-	Per Kg
	- Kacang Merah	25.000,-	15.000,-	10.000,-	8.000,-	-	Per Kg
	- Kacang Bogor	25.000,-	15.000,-	10.000,-	8.000,-	-	Per Kg
	- Tales Bogor	5.000,-	2.000,-	1.000,-	500,-	-	Per Batang
	- Ubi Jalar	5.000,-	2.000,-	1.000,-	500,-	-	Per Stek
	- Ubi Kayu	5.000,-	2.000,-	1.000,-	500,-	-	Per Stek
2	<b>Tanaman Hortikultura (Sayuran) :</b>						
	- Bawang Daun	10.000,-	8.000,-	6.000,-	4.000,-	-	Per Kg
	- Bawang Merah	40.000,-	35.000,-	30.000,-	25.000,-	-	Per Kg
	- Bawang Putih	50.000,-	45.000,-	40.000,-	35.000,-	-	Per Kg
	- Bayam	9.000,-	7.000,-	5.000,-	3.000,-	-	Per Gram
	- Cabe Merah	25.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	-	Per Gram
	- Cabe Rawit	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-	Per Gram
	- Jagung Manis	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100.000,-	-	Per Kg
	- Kacang Buncis	150.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-	-	Per Kg
	- Kacang Panjang	150.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-	-	Per Kg
	- Kentang	30.000,-	25.000,-	20.000,-	8.000,-	-	Per Kg
	- Kubis Bunga	20.000,-	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-	Per Gram
	- Melinjo	40.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Mentimun	15.000,-	10.000,-	7.500,-	3.000,-	-	Per Gram
	- Sawi	20.000,-	15.000,-	10.000,-	7.000,-	-	Per Gram
	- Seledri	20.000,-	15.000,-	8.000,-	5.000,-	-	Per Gram
	- Terong	15.000,-	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-	Per Gram
	- Tomat	15.000,-	10.000,-	7.500,-	5.000,-	-	Per Gram
	- Wortel	10.000,-	7.500,-	3.000,-	1.000,-	-	Per Gram

3	<b>Tanaman Hortikultura ( Buah-Buahan) :</b>						
	- Alpukat	50.000,-	35.000,-	15.000,-	8.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Anggur	30.000,-	20.000,-	10.000,-	6.000,-	-	Per Batang
	- Apel	25.000,-	20.000,-	10.000,-	7.500,-	-	Per Batang
	- Belimbing	35.000,-	25.000,-	11.000,-	6.500,-	5.000,-	Per Batang
	- Cempedak	25.000,-	25.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Ceremai	25.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Durian	75.000,-	50.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Jambu Air	50.000,-	40.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Jambu Biji	50.000,-	40.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Jambu Bol	50.000,-	40.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Jeruk	40.000,-	30.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Jeruk Besar	75.000,-	50.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Kedondong	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Kemang	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Lengkeng	300.000,-	200.000,-	100.000,-	50.000,-	10.000,-	Per Batang
	- Mangga	75.000,-	50.000,-	25.000,-	15.000,-	7.000,-	Per Batang
	- Manggis	100.000,-	75.000,-	25.000,-	20.000,-	10.000,-	Per Batang
	- Markisa	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Melon	20.000,-	15.000,-	10.000,-	7.500,-	-	Per Gram
	- Nangka	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Nanas	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	-	Per Batang
	- Pepaya	20.000,-	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-	Per Gram
	- Pisang	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Rambutan	75.000,-	50.000,-	25.000,-	15.000,-	7.000,-	Per Batang
	- Salak	75.000,-	50.000,-	25.000,-	15.000,-	7.000,-	Per Batang
	- Sawo	75.000,-	50.000,-	25.000,-	15.000,-	7.000,-	Per Batang
	- Semangka	15.000,-	10.000,-	7.500,-	5.000,-	-	Per Gram
	- Sirsak	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang
	- Strowberi	50.000,-	25.000,-	10.000,-	7.000,-	-	Per Batang
	- Sukun	30.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	Per Batang

## B. Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong

No	Uraian Jenis Komoditi	Spesifikasi Teknis	Harga Pasar (Rp)	Klasifikasi Bibit	Tarif (Kg/Btg/Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>Kelompok Tanaman Perkebunan</b>					
1	Aren	Benih siap tanam dalam polybag (25x20) cm umur 3-7 bulan	3.500,-	Sertifikat/Lokal	70
2	Karet	Biji untuk batang bawah berasal dari blok penghasil tinggi	150,-	Sertifikat BTPN	3
		Stum mata tidur	1.500,-	Berlabel	30
		Benih siap tanam dalam polybag minimal satu payung ukuran polybag (30x15 cm)	4.500,-	Label Merah Muda	90
3	Kelapa Dalam	Benih berupa butiran berasal dari blok penghasil tinggi	2.500,-	Sertifikat/Lokal	50
		Benih berupa tanaman, cabutan	6.800,-	Sertifikat/Lokal	136
		Benih umur 12 bulan dalam polybag	8.000,-	Sertifikat/Lokal	160
4	Kelapa Sawit	Benih umur 9-12 bulan	30.000,-	Berlabel	600
		Benih umur 13-18 bulan	35.000,-	Berlabel	700
5	Kopi Arabica	Benih siap tanam dalam polybag (25x15 cm) umur 5-6 bulan jumlah daun 7-10 lembar	3.500,-	Berlabel	70
		Benih siap tanam dalam polybag biji dalam kemasan anyaman bambu	3.000,-	Sertifikat/Lokal	60
6	Kopi Robusta	Benih siap tanam dalam polybag	2.500,-	Sertifikat/Lokal	50
7	Lada	Bibit siap tanam dalam polybag	3.000,-	Sertifikat/Lokal	60
		Bibit siap tanam dalam polybag (15x20 cm) umur 3-7 bulan	2.000,-	Sertifikat/Lokal	40
8	Nilam	Benih dalam polybag ukuran 15x20 cm	7.000,-	Sertifikat BTPN	140
		Stek ukuran polybag 30-40 cm	9.500,-	Sertifikat BTPN	190
9	Panili	Dalam polybag ukuran 15-25 cm umur 6 bulan	6.500,-	Sertifikat/Lokal	130
10	Pinang	Benih siap tanam dalam polybag (20x10 cm) umur 6-9 bulan	2.500,-	Sertifikat/Lokal	50
11	Pala	Benih siap tanam dalam polybag (30x20 cm) umur 6-9 bulan	7.500,-	Sertifikat/Lokal	150
<b>Kelompok Tanaman Kehutanan</b>					
1	Kayu Afrika	Bibit dalam polybag ukuran (10x15 cm) tinggi minimal 30 cm	4.000,-	Sertifikat	80
		Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 60 cm	6.000,-	Sertifikat	120
		Bibit dalam polybag ukuran (18x15 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200
2	Glodongan Tiang	Bibit dalam polybag ukuran (10x20 cm) tinggi minimal 30 cm	30.000,-	Sertifikat	600
		Bibit dalam polybag ukuran (18x25 cm) tinggi minimal 60 cm	40.000,-	Sertifikat	800
		Bibit dalam polybag ukuran (18x25 cm) tinggi minimal 80 cm	50.000,-	Sertifikat	1.000
3	Kayu Bawang	Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 30 cm	5.000,-	Sertifikat	100
		Bibit dalam polybag ukuran (15x20 cm) tinggi minimal 60 cm	8.000,-	Sertifikat	160
		Bibit dalam polybag ukuran (18x25 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200



4	Kayu Manis	Bibit dalam polybag ukuran (10x15 cm) tinggi minimal 30 cm	4.000,-	Sertifikat	80
		Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 60 cm	6.000,-	Sertifikat	120
		Bibit dalam polybag ukuran (10x20 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200
5	Kemiri	Bibit dalam polybag ukuran (10x15 cm) tinggi minimal 30 cm	5.000,-	Sertifikat	100
		Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 60 cm	7.000,-	Sertifikat	140
		Bibit dalam polybag ukuran (10x20 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200
6	Sengon Buto	Bibit dalam polybag ukuran (10x15 cm) tinggi minimal 30 cm	4.000,-	Sertifikat	80
		Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 60 cm	8.000,-	Sertifikat	160
		Bibit dalam polybag ukuran (10x20 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200
7	Sengon/Albazia Falceta	Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 30 cm	4.000,-	Sertifikat	80
		Bibit dalam polybag ukuran (15x20 cm) tinggi minimal 60 cm	7.500,-	Sertifikat	150
		Bibit dalam polybag ukuran (18x25 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200
8	Shorea, (Meranti) Sp	Bibit dalam polybag ukuran (10x15 cm) tinggi minimal 30 cm	5.000,-	Sertifikat	100
		Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 60 cm	7.500,-	Sertifikat	150
		Bibit dalam polybag ukuran (10x20 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200
9	Swietenia Mahagony (Mahoni)	Bibit dalam polybag ukuran (10x15 cm) tinggi minimal 30 cm	4.000,-	Sertifikat	80
		Bibit dalam polybag ukuran (13x17 cm) tinggi minimal 60 cm	7.000,-	Sertifikat	140
		Bibit dalam polybag ukuran (18x25 cm) tinggi minimal 80 cm	10.000,-	Sertifikat	200

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**SUHERMAN**